

PERTEMUAN 7

DEMOKRASI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi di pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu.

1. Menjelaskan pengertian demokrasi
2. Menganalisis prinsip-prinsip dan nilai demokrasi
3. Menggali dan menganalisis sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila

B. Uraian Materi

1. Pengertian Demokrasi

Definisi Demokrasi rakyat menginginkan negara berdasarkan hukum dan terpeliharanya kekuasaan masyarakat. Keinginan yang ada diikuti oleh pemahaman bahwa *law based government* memberikan celah bagi berkembangnya aturan tentang keberadaan rakyat untuk kepentingan Bersama. Maka dari itu, pemerintahan mayoritas harus dikembangkan, dipertahankan, dan diperhatikan rakyatnya. Setiap negara memiliki karakteristik klaimnya sendiri dalam penggunaan *sway* yang terkenal atau pemerintahan mayoritas. Biasanya ditentukan oleh sejarah bangsa yang bersangkutan, budayanya, cara hidupnya, dan tujuan yang harus diwujudkan. Dengan cara ini di setiap negara ada gaya tertentu dari pemerintahan populer yang tercermin dalam desain tertentu dari keadaan pikiran, keyakinan dan sentimen yang mendasari, mengkoordinasikan, dan memberikan makna pada perilaku masyarakat dan aturan mayoritas dalam sistem politik.

Ide demokrasi secara sederhana sering kali episode bagian dalam ungkapan, cerita atau mitos. Misalnya, masyarakat Minangkabau menyanjung-nyanjung tata susila demokrasi, yang diungkapkan episode bagian dalam ungkapan: "Air terlahir di episode bagian dalam bejana, kata-

kata terlalah episode bagian dalam mufakat". Suku Jawa, menyamakan khayal demokrasi dengan membidik jurus cara adicita Jawa pepe (berjemur) di front belahan kala kalam mencetuskan masalahnya menjelang Raja. Ada yang menguraikan terbit cerita wayang, bahwa Bima atau Werkudara mengabdikan belahan jiwa yang disebut Gelung Mangkara Unggul, artinya keluk tinggi di episode belakang. Hal ini diberikan budi pekerti bahwa adicita-adicita di belakangnya sebenarnya lebih mereguk karunia atau tinggi, artinya: berkuasa (Bintoro, 2006).

Secara etimologis, demokrasi berpokok pada kalimat Yunani Kuno, yaitu "demos" dan "*kratein*". "Demokrasi" adalah:

- a. Negara memiliki tujuan dan semua masyarakat berbagi melalui perwakilan yang dipilih.
- b. Negara menjamin hak – hak setia warga negaranya seperti: kebebasan berbicara, berpendapat, dan berserikat.
- c. Masyarakat diperlakukan sama dan setara

Dari kutipan di atas, istilah demokrasi merujuk dalam konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat di mana warga negara dewasa berpartisipasi pada pemerintahan melalui wakil-wakil yang mereka pilih; pemerintahannya mendorong dan mengklaim kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menjunjung tinggi "*rule of law*", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak gerombolan minoritas; dan masyarakat yang warganya saling menaruh perlakuan yang sama. Seperti yang disampaikan Abraham Lincoln "Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan buat rakyat" (*government by the people*). Karena "rakyat" adalah pusatnya, maka demokrasi menurut Pabottinggi (2002) diperlakukan menjadi pemerintahan yang memiliki paradigma "*otocentricity*" atau *autocentricity*, yaitu rakyat yang harus sebagai kriteria dasar demokrasi.

Sebagai sebuah konsep demokrasi diterima menjadi "...seperangkat ide dan prinsip mengenai kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan mekanisme yang telah dibuat melalui sejarah yang panjang dan acapkali berliku-liku, singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan kebebasan" (USIS, 1995).

Demokrasi yang secara konseptual dipersepsikan sebagai bingkai pemikiran bahwa penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat telah diterima secara universal sebagai cita-cita, norma, sistem sosial tertinggi, serta pengetahuan, sikap, dan perilaku individu yang secara kontekstual perlu didukung, dihargai, dan dikembangkan". Dikemukakan CISED (1999) melihat demokrasi menjadi konsep multidimensi, yaitu secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip "secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis menjadi wawasan, sikap dan perilaku individu yang secara kontekstual perlu didukung, dihargai, dan dikembangkan".

Dikemukakan sang CISED (1999) melihat demokrasi menjadi konsep multidimensi, yaitu dilihat filosofisnya demokrasi memiliki ide, norma dan prinsip, sosiologi adanya sistem sosial di mana dia tinggal, psikologi memiliki pengetahuan, sika[dan perilaku pada kehidupan bermasyarakat.

Dalam demokrasi terdapat prinsip dan pilar sebagai pendukung yang menjadi ciri dalam kehidupan bernegara. Sebagai sistem sosial negara, USIS (1995), dirangkum dalam sebuah sistem yang mempunyai 11 pilar atau pilar, yaitu "kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang dikuasai, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, hak asasi manusia terjamin, pemilihan umum yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang adil, pembatasan pemerintah konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, serta nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan konsensus".

Sanusi mengatakan, ada sepuluh pilar dalam demokrasi konstitusi menurut undang-undang dasar 1945. Demokrasi yang memiliki nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi dan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Independen, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kesejahteraan, dan demokrasi menggunakan keadilan sosial". Yang termuat pada pilar-pilar demokrasi universal adalah galat satu pilar demokrasi Indonesia yaitu "Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan inilah ciri demokrasi Indonesia, yang pada pandangan Maududi dan kaum Muslimin (Esposito, 1996) disebut "*theodemocracy*" yaitu demokrasi pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi yang bukan sekuler tapi demokrasi yang dari Tuhan dan Indonesia adalah menganut demokrasi dari ketuhanan.

Setiap negara mempunyai ciri masing – masing dalam demokrasi. Sejarah dari setiap bangsa, budaya, pandangan hidup, tujuan yang menentukan suatu negara. Suatu negara mempunyai ciri spesial dalam aplikasi kedaulatan rakyat atau demokrasi. Negara Indonesia sudah menghabiskan dirinya menjadi negara demokrasi atau negara warga yang berdaulat. Apakah Anda memahami di mana pernyataan itu dirumuskan? Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia mempunyai karakteristik spesial tersendiri. Apa ciri-karakteristik demokrasi Indonesia? Menurut Budiardjo (2008) dalam buku “Fundamentals of Political Science”, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi dari Pancasila yang masih berkembang dan sifat dan karakteristiknya terdapat banyak sekali penafsiran dan pandangan. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai dasar demokrasi yang ada di Indonesia, konstitusional tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa itu demokrasi Pancasila dan apa itu demokrasi konstitusional? Untuk mendalami hal tersebut, coba temukan banyak sekali pendapat tentang Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional. Apakah bangsa Indonesia mempunyai tradisi demokrasi sebelum kata demokrasi Pancasila muncul? Sebaiknya kita mengikuti pendapat Muhammad Hatta, yang dikenal menjadi Bapak Demokrasi Indonesia. Menurut Moh. Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi Jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa. Demokrasi desa adalah demokrasi asli Indonesia yg bercirikan tiga hal, yaitu:

- a. Memenuhi keinginan.
- b. Keinginan bersama.
- c. Aspirasi untuk membantu.

Unsur diatas sebagai acuan dasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia terkini. Demokrasi Indonesia terkini adalah “kedaulatan rakyat” tidak hanya pada bidang politik, namun juga pada bidang ekonomi dan sosial. Pentingnya Demokrasi menjadi sistem politik negara modern. Mengapa demokrasi dipilih menjadi cara bentuk pemerintahan buat mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan? Demokrasi menjadi bentuk pemerintahan, awalnya dimulai berdasarkan sejarah Yunani kuno. Namun, demokrasi ketika itu hanya menaruh hak partisipasi politik pada sebagian kecil pria dewasa.

Menurut Palto dan Aristoteles sebagai pemikir Yunani kuno, mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka melihat demokrasi bagi pemerintahan ekonomi rendah atau orang yang tidak berpendidikan. Negara Indonesia telah menghabiskan dirinya sebagai negara demokrasi atau negara rakyat yang berdaulat. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Apa karakteristik-karakteristik demokrasi Indonesia? Menurut Budiardjo (2008) dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang masih berkembang dan ciri dan cirinya memiliki berbagai penafsiran dan pandangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendalami hal tersebut, coba temukan berbagai pendapat tentang demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional. Apakah bangsa Indonesia mempunyai tradisi demokrasi sebelum kata demokrasi Pancasila muncul? Sebaiknya kita mengikuti pendapat Drs. Muhammad Hatta, yg dikenal menjadi Bapak Demokrasi Indonesia.

Sebelum Indonesia merdeka, sesungguhnya kita sudah mengenal demokrais, demokrasi itu adalah demokrasi desa yang memiliki ciri – ciri sebagai berikut: cita – cita, kritikan dan harapan gotong royong. Ketiga unsur demokrasi desa inilah yang menjadi dasar berkembangnya demokrasi Indonesia modern. Demokrasi Indonesia terkini adalah “kedaulatan warga ” tidak hanya pada bidang politik, tetapi juga pada bidang ekonomi dan sosial.

2. Prinsip dan Nilai Demokrasi

Demokrasi memiliki prinsip, prinsip ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam mufakat. Dalam pengambilan keputusan diperlukan musyawarah, ini sebagai ciri dalam demokrasi. Konsensus merupakan hasil kesepakatan bersama. Konsensus ini harus memperhatikan kepentingan rakyat dengan kebijaksanaan pada permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan harus dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur serta memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Keputusan yang sudah di ambil wajib dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan.

Keputusan yang di ambil harus dengan kejujuran.

Ada 10 pilar atau prinsip demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- a. Sitem penyelenggaraan pemerintah wajib berpegang teguh kepda nilai Ketuhanan Yang Maha esa, dengan prinsip dan konsisten.
- b. Pelaksanaan demokrasi menggunakan kecerdasan bukan dengan naluri, otot dan kekuatan masa saja. Demokrasi di atur dalam Undang – Undang Dasar 1945, dengan di selaraskan kecerdasan, spiritualitas, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.
- c. Kedaulatan ada pada tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam pemerintahan Indonesia kedaulatan rakyat di percayakan kepada anggota DPR, DPRD, DPD sebagai waakil rakyat.
- d. Demokrasi *rule of law* memiliki 4 (empat) arti penting. *Pertama*, kekuasaan negara Republik Indonesia harus menampung, melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi sembrono, demokrasi slapstick, atau demokrasi manipulatif. *Kedua*, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal. dan berpura-pura. *Ketiga*, kekuasaan negara menjamin keamanan hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kekacauan atau anarki. *Keempat*, kekuasaan negara mengembangkan kemaslahatan atau kepentingan hukum, seperti perdamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan penistaan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
- e. Di Indonesia ada pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan dan pembagian kekuasaan ini tidak dibatasi dengan hukum. Demokrasi dengan Pemisahan Kekuasaan Negara berdasarkan UUD 1945
- f. Hak asasi manusia berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 tujuannya bukan untuk menghormati hak orang lain saja, tetapi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- g. Demokrasi dilaksanakan dilaksanakan secara independen memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan dan mencariaturan yang seadil adilnya.

- h. Dalam demokrasi di Indonesia menggunakan otonomi daerah sebagai pembatas kekuasaan negara. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam taraf pusat dan di khususkan lagi pembatasan kekuasaan presidensial. Demokrasi menggunakan otonomi daerah merupakan pembatasan kekuasaan negara, terutama kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam taraf pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan kekuasaan presidensial.
- i. Demokrasi dibuat untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bukan membahas masalah sosial, kewajiban terhadap kita semua. Bukan hanya menyelenggarakan kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara.
- j. Demokrasi memiliki nilai berkeadilan sosial, sesuai Undang – Undang Dasar 1945 menjabarkan keadilan sosial antara golongan dan lapisan masyarakat, tidak terdapat golongan, kesatuan atau organisasi yang sebagai anak emas yang diberikan banyak sekali keistimewaan atau hak istimewa.

Ada kemiripan antara demokrasi Indonesia dengan demokrasi universal. Demokrasi Pancasila memiliki ciri dan karakteristik sendiri jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya, yaitu:

- a. Dalam pelaksanaan pemerintahannya menggunakan konstitusi
- b. Kegiatan pemilihan umum, dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak rakyat minoritas.
- c. Dalam pelaksanaan proses demokrasi dapat sebagai munculnya ide dan cara dalam memecahkan masalah.

Beberapa nilai demokrasi menjadi kriteria dan ideal yang menjadi tolak ukur dalam demokrasi, yaitu:

- a. Indonesia harus diberikan wawasan dan pemahaman tentang demokrasi. Untuk warga dan elite politik ketika paham akan arti nilai demokrasi maka akan menjadi suatu kepentingan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dianggap baik dan buruk.
- b. Partisipasi efektif dalam demokrasi di butuhkan partisipasi warganya

dalam memberikan masukan, wacana dalam mengambil keputusan.

- c. Pengendalian agenda, dilakukan untuk mengendalikan suatu program pada proses mengambil keputusan yang bersifat sempit dan terbatas dengan mengutamakan skala prioritas yang ditentukan oleh kelompok dan kekuatan eksklusif pada masyarakat.
- d. Kesetaraan nilai suara dalam pengambilan keputusan, setiap warga negara yang memiliki hak suara dapat menggunakan hak suaranya dengan baik.
- e. Inklusivitas, ciri dari inklusivitas berhubungan dengan orang lain. Setiap orang yang melakukan demo adalah orang yang tunduk dan terikat pada keputusan bersama pada kelompok tersebut.

Dari nilai-nilai yang ada, menghasilkan suatu bentuk budaya politik yang nantinya menjadi budaya demokrasi, budaya itu adalah:

- a. sederajat
- b. masyarakat yang majemuk
- c. Terbuka
- d. berdialog
- e. membujuk secara halus
- f. kekuasaan bersama
- g. pengawasan yang aktif
- h. dipilih
- i. demokrasi dikaji kembali sejarahnya

3. Menggali Sumber Sejarah, Sosiologis dan Politik tentang Demokrasi Pancasila

Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi kolektif Indonesia mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu tidak bisa dihilangkan selamanya. Menurutnya, demokrasi mampu ditekan lantaran kesalahannya sendiri, namun setelah mengalami cobaan yang pahit akan muncul kembali dengan penuh keyakinan. Setidaknya ada

(tiga) sumber yang menghidupkan hasrat demokrasi pada hati bangsa Indonesia. *Pertama*, tradisi kolektivisme musyawarah desa. *Kedua*, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ke-Tuhanan dalam masyarakat dan persaudaraan antar manusia menjadimakhluk Tuhan. *Ketiga*, ideologi sosial barat yang menarik perhatian para tokoh

konvoi nasional lantaran prinsip kemanusiaan yg dibelanya dan sebagai tujuannya.

a. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa

Maksud dari demokrasi berasal dari desa, demokrasi muncul dari desa – desa dan kerajaan – kerajaan di Indonesia, yang sebenarnya sudah di praktekkan dalam kehidupan sehari – hari. Nilai demokrasi muncul dari budaya nusantara yang dilaksanakan dalam kelompok – kelompok kecil menjadi politik kecil. Dalam sejarah ada beberapa hal yaitu: bahwa, pengertian kedaulatan masyarakat sebenarnya sudah lama tumbuh pada Nusantara. Di global Minangkabau misalnya, dalam abad XIV hingga XV kekuasaan raja dibatasi sang kepatuhannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yg cukup terkenal dalam waktu itu yaitu “Rakyat memerintah atas penghulu, penghulu memerintah atas musyawarah, dan musyawarah mengatur alur dan sewajarnya”. Raja pada budaya Minangkabau adalah pemecah terakhir sebagai akibatnya keputusan seorang raja akan ditolak jika bertentangan menggunakan akal sehat dan prinsip keadilan (Malaka, 2005), tanah sebagai faktor produksi yang krusial tidak dikuasai oleh raja, tetapi dimiliki beserta oleh warga. Karena kepemilikan atas tanah desa ini, harapan setiap orang buat menggunakannya wajib melalui persetujuan rakyatnya.

Dengan adanya tradisi gotong royong maka dapat memanfaatkan tanah secara bersama – sama, yang kemudian menyebar ke bidang-bidang lain, termasuk hal-hal yg menyangkut kebutuhan pribadi seperti memunculkan norma musyawarah mengenai kebutuhan bersama yang diputuskan secara mufakat (kesepakatan). Ada dua tradisi demokrasi desa yaitu hak buat mengadakan protes beserta terhadap peraturan raja yang dirasa tak adil, dan hak masyarakat buat keluar dari daerah karena sudah merasa tidak senang lagi tinggal di sana. Dalam unjuk rasa, masyarakat umumnya berkumpul pada alun-alun & duduk sementara waktu tanpa

melakukan apa-apa, yg adalah bentuk demonstrasi damai. Tidak jarang orang yg sabar melakukan hal itu, namun saat dilakukan, pertanda itu mendeskripsikan situasi kepentingan yang memaksa pihak berwenang buat mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkan. Hak itu bisa dianggap menjadi hak seseorang untuk memilih nasib sendiri. Semua itu sebagai bahan dasar pertimbangan para *founding fathers* bangsa buat mencoba membentuk hukum dimana demokrasi Indonesia muncul berawal dari demokrasi desa (Latif, 2010).

b. Sumber nilai yang berasal dari Islam

Agama islam mengajarkan demokrasi berdasarkan teologis. Dalam keyakinan islam bahwa Tuhanlah yang wajib dipercaya dan diyakini keberadaannya. Sesuatu yselain Tuhan adalah murni relatif. Artinya yang mengatur kehidupan sosial manusia akan melahirkan kekuasaan yang absolut yang dipercaya bertentangan dengan semangat tauhid (Latif, 2011).

Dalam kekuasaan mutlak sesama manusia merupakan tidak adil dan tidak beradab. Sikap tunduk kepada Tuhan, dibutuhkan tatanan sosial yang terbuka, adil dan demokratis (Majid, 1992). Sedangkan berdasarkan tauhid bahwa manusia memiliki kesetaraan di hadapan Tuhan, dimana Tuhan mengajarkan untuk tidak menghina dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Seorang utusan Tuhan hanya bertugas untuk menyampaikan kebenaran (Itablig) kepada umat manusia. Menurut agama islam setiap manusia sangat dimuliakan dalam kehidupannya, kehormatannya memiliki hak dan kebebasan dimana dengan hak dan kebebasan itu harus menjadi manusia yang bermoral dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sejarah islam menceritakan bahwa nilai – nilai demokrasi sebagai pamcaran prinsip tauhid seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, sejak awal berkembangnya kelompok politik islam di Madinah dengan menyebarkan dasar ini yang kemudian dikenal dengan bangsa. Madinah adalah negara yang dibangun Nabi atas dasar etitas politik yang berdasarkan konsepsi negara bangsa, yaitu negara buat seluruh orang atau rakyat negara, buat kepentingan bersama (*common good*). Sebagaimana dinyatakan pada Piagam Madinah, negara-bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat sebagai suatu bangsa. Satu (*ummatah wahidah*)

tanpa membedakan gerombolan kepercayaan yang ada. Agama Islam membuka perubahan dari sistem sosial feoda yang berbasis kasta ke sistem sosial yang lebih egaliter. Kemudian perubahan ini dapat dilihat dari perubahan perilaku psikologis masyarakat terhadap penguasa.

Demokrasi bangsa Eropa adalah demokrasi yang panjang. Dimana Yunani kota Athena sebagai pusat pertumbuhan demokrasi terpenting Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Yang tak jarang disebut-sebut sebagai model penerapan demokrasi partisipatif pada negara-kota lebih kurang abad ke-5 SM. Selanjutnya praktik pemerintahan serupa muncul di Roma, tepatnya pada kota Roma (Italia), yaitu sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis contoh Athena dan Roma ini lalu menyebar ke kota-kota lain seperti Florence dan Venesia. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi sekitar abad ke-5 M, sempat bangkit di beberapa kota Italia sekitar abad ke-11 M, kemudian menghilang di Eropa abad pertengahan. Setidaknya sejak 1300 M, sebagai akibat kemunduran ekonomi, korupsi dan perang, pemerintah Eropa yang semula demokratis diganti menjadi otoriter (Dahl, 1992). Dari sini dimulai adanya pemikiran humanis dari masa renaissance mendorong kembalinya demokrasi di Eropa. Adanya gerakan reformasi protestan yang pada saat itu memprotes dengan kebijakan gereja hingga tercapai kesepakatan Westphalia pada tahun 1648, meletakkan adanya prinsip yaitu agama dan negara sebagai pembuka jalan bagi bangkitnya negara dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

C. Soal Latihan/Tugas

1. Maraknya praktek politik uang di Indonesia, sangatlah memprihatinkan. Sehingga mencemarkan nama baik bangsa Indonesia. Lalu apa saja tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini!
2. Apa yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Bagaimana mencegahnya!
3. Menurut Anda pemimpin yang bagaimana yang dapat memimpin pemerintahan secara demokrasi!

D. Referensi

Pendidikan Kewarganegaraan. Cetakan I. (2016). Jakarta: Direktorat. Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen)

Zulfikri Sulaeman, *Demokrasi untuk Indonesia*, Pemikiran Politik Bung Hatta, Gramedia, Jakarta, 2009

Thomas T Pureklolon, *Demokrasi dan Politik*, Menelisiki kekuasaan, Sosial, Budaya, Pancasila, Intrus Publishing, 2009

Sumber Internet:

<https://en.fis.um.ac.id/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/>

<https://eprints.uny.ac.id/26628/9/9/%20RINGKASAN>

<http://www.gurupendidikan.co.id>

<https://www.dosenpendidikan.co.id>